

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja							Keuangan			
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif	Indeks Pelayanan Publik	1	Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	0	0	0.00				

B. FAKTOR PENDUKUNG

Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan faktor pendukungnya : Adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (telah dibentuk Tim Satgas SPIP di Level Pemda dan Tim Pengelola Risiko di Level Perangkat Daerah), Telah dilaksanakan monitoring terhadap implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Semester II Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I Tahun 2026, Telah dilakukan penyesuaian dokumen RTP Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dan Dukungan pembinaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam penguatan implementasi SPIP di pemerintah daerah.

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan faktor pendukungnya adalah Ketersediaan dokumen dan data dukung yang diperlukan dalam proses penilaian kapabilitas APIP (Telah dilaksanakannya proses penilaian Kapabilitas APIP Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tanggal 2 Februari sampai dengan 7 Maret 2026) dan Komitmen pimpinan dan aparatur pengawasan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan internal.
2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan faktor pendukungnya adalah Adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan upaya pencegahan korupsi, serta Dukungan kebijakan dan program penguatan integritas di lingkungan pemerintah daerah.

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dan faktor pendukungnya : Adanya partisipasi pengguna layanan dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Telah dilaksanakan pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna layanan Inspektorat sejak Triwulan I).

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan faktor penghambatnya : Penilaian maturitas SPIP belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I karena proses penilaian mandiri melalui aplikasi masih dalam tahap persiapan, Sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian penilaian mandiri SPIP kepada perangkat daerah baru akan dilaksanakan pada Triwulan II dengan menghadirkan narasumber dari BPKP, dan Masih diperlukan penyesuaian dokumen pengendalian intern pada perangkat daerah sebagai dampak perubahan SOTK.

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan faktor penghambatnya adalah Proses penilaian masih berlangsung sehingga hasil resmi penilaian Kapabilitas APIP belum dapat ditetapkan pada Triwulan I, Terdapat perubahan metode dan kriteria penilaian sesuai regulasi terbaru yaitu Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga terjadi penyesuaian dalam proses penilaian dan berdasarkan surat edaran dari BPKP terdapat potensi penurunan nilai Kapabilitas APIP karena perbedaan kesetaraan level dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.
2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan faktor penghambatnya adalah Penilaian IEPK belum dilaksanakan pada Triwulan I karena proses pendampingan penilaian mandiri baru akan dilaksanakan pada Triwulan II dan Kebutuhan pengumpulan dan verifikasi data dukung dari perangkat daerah sebagai bagian dari proses penilaian.

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dan faktor penghambatnya : Proses pengumpulan data survei masih berlangsung hingga Triwulan III dan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara periodik dan hasil akhir baru dapat diperoleh pada akhir tahun setelah seluruh data survei terkumpul.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengisian penilaian mandiri maturitas SPIP kepada perangkat daerah pada Triwulan II dengan narasumber dari BPKP, Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dan implementasi RTP Tahun 2026, Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RTP guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah (sesuai yang telah tercantum dalam program kerja pengawasan tahunan/PKPT tahun 2026), serta Mengkoordinasikan pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian maturitas SPIP dengan tim pelaksana pendampingan penilaian mandiri SPIP perangkat daerah.

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Menindaklanjuti hasil penilaian Kapabilitas APIP yang akan ditetapkan oleh BPKP, Melakukan identifikasi area perbaikan berdasarkan hasil evaluasi penilaian kapabilitas APIP dan Menyusun langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2026 (sudah dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman ke APIP oleh Inspektur di Triwulan I).
2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Melaksanakan pendampingan penilaian mandiri IEPK kepada perangkat daerah pada Triwulan II (sesuai rencana yang telah tercantum dalam program kerja pengawasan tahunan/PKPT Tahun 2026), Mengkoordinasikan pengumpulan data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penilaian serta Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dan tindak lanjut di Triwulan berikutnya adalah Melanjutkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan Inspektorat hingga Triwulan III, Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan layanan dan merumuskan solusi perbaikan pelayanan, dan Menyusun rekomendasi peningkatan kualitas layanan berdasarkan hasil survei dan pembahasan FGD.

Wonogiri, 06 Januari 2026



**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MULYANTO, S.E.
: Sekretaris
: MARDIANTO, S.E.
: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	IKM Inspektorat	1	Tercapainya tertib pelaporan administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	%	100	100	100.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.233.206.516	1.566.932.573	21.66
			1.1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	%	16	33	206.25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.927.000	360.750	18.73
			1.2	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	100.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.692.929.956	1.522.033.726	22.74
			1.3	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase layanan administrasi BMD	%	0	0	0.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	462.800	0	0
			1.4	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	100.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122.080.000	0	0
			1.5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.752.810	2.807.000	2.18

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.6	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	%	25	25	100.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.672.000	28.525.296	16.91
			1.7	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	%	7	11	157.14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.383.350	13.205.801	11.16
					Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat	Angka	0	0	0.00		7.233.206.616	1.566.932.572	21.66
					Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	0	0	0.00		7.233.206.616	1.566.932.572	21.66
					Jumlah Inovasi Inspektorat	Angka	0	0	0.00		7.233.206.616	1.566.932.572	21.66

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Pensektoran Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah dengan Capaian 100% : Adanya komitmen unit kerja dalam menyampaikan laporan kinerja tepat waktu, Koordinasi yang baik antara pengelola kinerja dengan pejabat struktural dan staf penyusun laporan serta Pemanfaatan sistem pelaporan kinerja yang memudahkan proses monitoring dan pengumpulan data.
2. Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat (Belum dapat diukur capaiannya di Triwulan I tahun 2026 karena belum ada realisasinya) : Tersedianya regulasi dan pedoman terkait penilaian kematangan organisasi dan Dukungan pimpinan dalam peningkatan tata kelola organisasi Inspektorat.
3. Nilai SAKIP Inspektorat (Belum tersedia realisasinya di Triwulan I tahun 2026) : Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sebagai bagian dari implementasi SAKIP dan Komitmen perangkat daerah dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja.
4. Jumlah Inovasi Inspektorat (Belum ada inovasi yang tercatat pada Triwulan I tahun 2026) : Adanya dukungan pimpinan terhadap pengembangan inovasi di lingkungan Inspektorat dan Tersedianya peluang pengembangan inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ketersediaan data dan arahan pimpinan sehingga opsional melebihi rencana target di Triwulan I karena adanya penugasan tambahan untuk melakukan perubahan atas dokumen perencanaan RYF (Rencana Tindak Pengendalian) Tahun 2026 sebagai penyesuaian atas perubahan BOK di Tahun 2026

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Ketersediaan data, dokumen, koordinasi dengan bawahan dan arahan dari pimpinan sehingga Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat terlaksana di Triwulan I Tahun 2026

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I Tahun 2026 sehingga realisasinya belum ada

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Ketersediaan data, koordinasi yang baik, serta arahan pimpinan sehingga kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di triwulan I tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Ketersediaan data, koordinasi dan arahan dari pimpinan sehingga pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dapat terlaksana sesuai rencananya di Triwulan II tahun 2026

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketersediaan data, anggaran dan arahan pimpinan sehingga kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk pembayaran PPK Paruh Waktu dan pembayaran listrik, air, telepon di Triwulan I tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah dengan Capaian 100% : Masih terdapat potensi keterlambatan pelaporan apabila terjadi pergantian personel pengelola laporan dan Ketertarikan pada kelengkapan data dari unit kerja terkait.
2. Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat (Belum dapat diukur capaiannya di Triwulan I tahun 2026 karena belum ada realisasinya) : Penilaian kematangan organisasi belum dilaksanakan pada Triwulan I dan Ketersediaan data dukung dan dokumen penilaian masih dalam proses pengumpulan.
3. Nilai SAKIP Inspektorat (Belum tersedia realisasinya di Triwulan I tahun 2026) : Penilaian SAKIP dilakukan oleh instansi evaluator masih berlangsung dan Proses evaluasi membutuhkan kelengkapan dokumen kinerja selama satu tahun.
4. Jumlah Inovasi Inspektorat (Belum ada inovasi yang tercatat pada Triwulan I tahun 2026) : Proses perumusan inovasi masih dalam tahap identifikasi dan pengembangan dan Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengembangan inovasi pada awal tahun.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat berjalan lancar.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pelaksanaannya belum berjalan di Triwulan I Tahun 2026.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tidak terdapat penghambat yang krusial sehingga kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat terlaksana di Triwulan I tahun 2026.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat terlaksana di Triwulan I tahun 2026.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Peningkatan Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah dengan Capaian 100% : Mempertahankan kedisiplinan pelaporan melalui monitoring berkala, Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada pengelola pelaporan kinerja dan Melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas laporan kinerja yang disampaikan.
2. Nilai Kematangan Organisasi Inspektoriat (Belum dapat diukur capaiannya di Triwulan I tahun 2026 karena belum ada realisasinya) : Mempersiapkan dokumen dan data dukung yang diperlukan untuk penilaian kematangan organisasi, Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penilaian dan Penetapan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran pada periode yang telah ditetapkan.
3. Nilai SAKIP Inspektoriat (Belum tersedia realisasinya di Triwulan I tahun 2026) : Menghimpun dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada seluruh proses manajemen kinerja dan Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SAKIP.
4. Jumlah Inovasi Inspektoriat (Belum ada inovasi yang tercatat pada Triwulan I tahun 2026) : Mengidentifikasi potensi inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Mendorong partisipasi pegawai dalam pengembangan inovasi dan Menyusun dan mengusulkan inovasi untuk diimplementasikan pada periode berikutnya.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Triwulan II tahun 2026

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Triwulan II tahun 2026

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan ke bawah terkait penyusunan dokumen atas rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Triwulan I di Triwulan II Tahun 2026

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Triwulan II tahun 2026

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Triwulan II tahun 2026

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Triwulan II tahun 2026

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Triwulan II tahun 2026



Wonggir, 02 April 2026

Sekretaris

MULYANTO, S.E.
196806181993031010

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
 Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Saasan Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	60	60	100.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	61.691.780	9.910.500	16.06
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	16	26	162.50	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.686.780	2.375.000	13.43

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	38	46	121.05	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	44.005.000	7.535.500	17.12
			2	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	%	0	100	0.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	19.459.488	1.500.000	7.71
			2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	1.000.170	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2.2	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	0	20	0.00	Pendampingan dan Asistensi	18.459.318	1.500.000	8.13

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan I sudah mencapai 60% dengan faktor pendukungnya adalah Adanya komitmen perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, Tersedianya regulasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan Dukungan sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi yang memudahkan pemantauan (SIMHP/Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan).

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim. Meskipun mendapat tugas mandatori di luar perencanaan yang harus dilaksanakan atas penanganan kasus aduan masyarakat tetap dapat terselesaikan sehingga realisasinya melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi atas Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan pada semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri dengan faktor pendukungnya : Dukungan kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah, Tersedianya sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi dalam pengendalian intern dan penguatan integritas dan Adanya kebutuhan perangkat daerah terhadap pendampingan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai yang telah direncanakan dan tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan kegiatan terkait upaya pemberantasan korupsi melalui sosialisasi peraturan Bupati tentang penanganan pengaduan yang pelaksanaannya lebih awal dari rencana aksinya. Namun demikian, kegiatan ini dapat berjalan lancar karena adanya respon positif dari semua perangkat daerah dan dukungan serta arahan pimpinan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan I sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang dan Ketersediaan data dukung tindak lanjut dari perangkat daerah masih dalam proses pengumpulan.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan I

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pendampingan dan Asistensi

Tidak ada faktor penghambat yang bersifat krusial atas kegiatan yang berjalan di Triwulan I

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya adalah Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan), Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Menyusun jadwal pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah sesuai yang telah dicantumkan dalam PKPT Tahun 2026, Melaksanakan kegiatan pendampingan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pengawasan tahunan dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern perangkat daerah.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PFBR)

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan masih atas pendampingan dan asistensi untuk aktivitas MCSP dan Pengendalian Gratifikasi di Triwulan II.

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
 Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kevenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	16	26	162.50	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.686.780	2.375.000	13.43
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	1	0.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	509.830	0	0
			1.2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	0	1	0.00	Reviu Laporan Kinerja	100.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Desa	9.065.950	2.375.000	26.20
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	0	0	0.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7.910.000	0	0
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	38	46	121.05	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	44.005.000	7.535.500	17.12
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	5	6	120.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	44.005.000	7.535.500	17.12

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
3	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	3	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.000.170	0	0.00
			3.1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.170	0	0
			4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	0	20	0.00	Pendampingan dan Asistensi	18.459.318	1.500.000	8.13

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			4.1	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	0	1	0.00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18.459.318	1.500.000	8.13

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Desa

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan reviu antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim. Meskipun mendapat tugas mandatori di luar perencanaan yang harus dilaksanakan atas penanganan kasus aduan masyarakat tetap dapat terselesaikan sehingga realisasinya melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Capaiannya melebihi target yang direncanakan karena adanya penambahan tugas mandatori di luar rencana atas penanganan kasus aduan masyarakat

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan kegiatan terkait upaya pemberantasan korupsi melalui sosialisasi peraturan Bupati tentang penanganan pengaduan yang pelaksanaannya lebih awal dari rencana aksinya. Namun demikian, kegiatan ini dapat berjalan lancar karena adanya respon positif dari semua perangkat daerah dan dukungan serta arahan pimpinan.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan sebagai salah satu kegiatan dalam Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan I yang pelaksanaannya maju dari rencana sehingga telah ada realisasinya meskipun targetnya masih '0'.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Desa Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga penandatanganan kerjasama pengawasan internal antar tim dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terselesaikan meski mendapat tambahan tugas mandatori di luar perencanaan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pendampingan dan Asistensi

Tidak ada faktor penghambat yang bersifat krusial atas kegiatan yang berjalan di Triwulan I

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial di Triwulan I

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Kinerja pada Perangkat Daerah lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan berikutnya

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan III sebagai rekomendasi dalam pertimbangan penyusunan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko (PKPT-BR) Tahun 2027

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan masih atas pendampingan dan asistensi untuk aktivitas MCSP dan Pengendalian Gratifikasi di Triwulan II.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Persiapan pelaksanaan di Triwulan II atas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi seperti pelaksanaan monitoring (MCSP, SPI, Pengendalian Gratifikasi, Pendampingan Desa Anti Korupsi dan FCP)

Wonogiri, 02 April 2026

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi



ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
197006201994012001

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SRIYONO, S.Sos, M.M.
 Jabatan Pelapor : Plt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	0	0	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	33.412.832	850.000	2.54
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	7	22	314.29	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	16.901.920	750.000	4.44

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	42	42	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	100.000	0.61

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiannya di Triwulan I masih 0 dengan faktor pendukungnya adalah Adanya komitmen perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, Tersedianya regulasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan Dukungan sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi yang memudahkan pemantauan (SIMHP/Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan).

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksi nya di Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiannya di Triwulan I masih 0 dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan I belum terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang jatuh tempo untuk ditindaklanjuti, Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang dan Ketersediaan data dukung tindak lanjut dari perangkat daerah masih dalam proses pengumpulan.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiannya di Triwulan I masih 0 dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan), Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: **SRIYONO, S.Sos, M.M.**
: **Pit. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat**
: **MARDIANTO, S.E**
: **Inspektur**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	7	22	314,29	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	16.901.920	750.000	4,44
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	300.000	24,00
			1.2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	0	4	0,00	Revisi Laporan Kinerja	1.200.000	0	0
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	0	0	0,00	Pengawasan Desa	13.950.920	450.000	3,23
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100,00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Dokumen	0	0	0,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	400.000	0	0

No	Batasan Program Atas	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	42	42	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	100.000	0.61
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	6	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	100.000	0.61

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksi nya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Revisi Laporan Kinerja

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksi nya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Desa

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan revisi antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pemeliharaan Penguasaan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang muncul sehingga pelaksanaan dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang muncul sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2026 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Rendahnya Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang muncul karena pengawasan berfokus pada setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi esensial di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi ASEP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat karena semua Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pembekuannya di Triwulan I

Kejelasan Penguasaan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang muncul sehingga pelaksanaan kegiatan penguasaan internal antar unit dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APT

Berikut semua laporan pengawasan yang sudah dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi menimbulkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Pengendalian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang muncul sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang muncul sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Kinerja pada Perangkat Daerah lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan berikutnya

Revisi Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan II

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wongiri, 02 April 2026

Pt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

SRIYONO, S.Sos, M.M.
197103271991011002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
 Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	33.33	33.33	100.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	38.119.750	1.200.000	3.15
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	14	28	200.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	23.614.750	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	27	31	114.81	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14.505.000	1.200.000	8.27

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiannya di Triwulan I masih kurang dengan capaian 33,33% dengan faktor pendukungnya adalah tersedianya regulasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan Dukungan sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi yang memudahkan pemantauan (SIMHP/Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan).

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim. Meskipun mendapat tugas mandatori di luar perencanaan yang harus dilaksanakan terkait penyelesaian kerugian daerah pada SD N 1 Semen Jatisono tetap dapat terselesaikan sehingga realisasinya melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiannya di Triwulan I masih kurang dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan I masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum selesai ditindaklanjuti, Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang dan Ketersediaan data dukung tindak lanjut dari perangkat daerah masih dalam proses pengumpulan.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan), Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
 Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	14	28	200.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	23.614.750	0	0.00
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	0	0
			1.2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.400.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	0	6	0.00	Reviu Laporan Kinerja	1.050.000	0	0
			1.4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100.00	Reviu Laporan Keuangan	5.900.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	0	0	0.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8.913.750	0	0
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	27	31	114.81	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14.505.000	1.200.000	8.27

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2.1	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	0	1	0.00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	900.000	600.000	66.67
			2.2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	6	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13.605.000	600.000	4.41

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I tahun 2026

Reviu Laporan Keuangan

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan reviu antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim. Meskipun mendapat tugas mandatori di luar perencanaan yang harus dilaksanakan terkait penyelesaian kerugian daerah pada SD N 1 Semen Jatisrono tetap dapat terselesaikan sehingga realisasinya melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I tapi telah ada realisasinya di Triwulan I karena adanya tugas mandatori di luar perencanaan yang harus dilaksanakan terkait penyelesaian kerugian daerah pada SD N 1 Semen Jatisrono

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Reviu Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga penandatanganan kerjasama pengawasan internal antar tim dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan tugas mandatori atas penyelesaian kerugian daerah di Triwulan I dapat berjalan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait reviu laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pelaksanaan pembahasan penyelesaian kerugian daerah dengan BPK di Triwulan II atas penanganan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset
Daerah

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
197402061999032008

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SRIYONO, S.Sos, M.M
 Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	72	72	100.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	34.051.920	10.248.000	30.10
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	7	18	257.14	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	16.246.920	3.110.000	19.14

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	15	25	166.67	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	7.138.000	40.09

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan I sudah mencapai 72% dengan faktor pendukungnya adalah Adanya komitmen perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, Tersedianya regulasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan Dukungan sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi yang memudahkan pemantauan (SIMHP/Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan).

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim. Meskipun mendapat tugas mandatori di luar perencanaan yang harus dilaksanakan terkait Reviu Realisasi Penggunaan SILPA DAU Tahun 2024 yang ditentukan penggunaannya dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dan Penilaian Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah tetap dapat terselesaikan sehingga realisasinya melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan I sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang dan Ketersediaan data dukung tindak lanjut dari perangkat daerah masih dalam proses pengumpulan.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya adalah Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan), Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SRIYONO, S.Sos, M.M
 Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 Nama Pimpinan yang Melakukan Money : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Beban Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	7	18	257.14	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	16.246.920	3.110.000	19.14
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	0	0
			1.2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	0	3	0.00	Revisi Laporan Kinerja	1.100.000	0	0
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Desa	13.395.920	3.110.000	23.22
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	0	0	0.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	15	25	166.67	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	7.138.000	40.09
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	3	5	166.67	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	7.138.000	40.09

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2025 sehingga realisasinya melebihi rencana akai nya di Triwulan I Tahun 2025

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Revisi Laporan Kinerja

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2025 sehingga realisasinya melebihi rencana akai nya di Triwulan I Tahun 2025

Pengawasan Desa

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam pematangan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan revisi antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 serta arahan pimpinan dan komitmen tim. Meskipun mendapat tugas mandatori di luar perencanaan yang harus dilaksanakan terkait Revisi Realisasi Penggunaan SILPA DAU Tahun 2024 yang ditentukan penggunaannya dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dan Penilaian Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah tetap dapat terselesaikan sehingga realisasinya melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Capaiannya melebihi target yang direncanakan karena adanya penambahan tugas mandatori di luar rencana untuk Revisi Realisasi Penggunaan SILPA DAU Tahun 2024 yang ditentukan penggunaannya dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dan Penilaian Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Desa Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga penandatanganan kerjasama pengawasan internal antar tim dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan DPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terselesaikan meski mendapat tambahan tugas mandatori di luar perencanaan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Revisi Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

SRIYONO, S.Sos, M.M
197103271991011002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
 Jabatan Pelapor : Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	76.92	76.92	100.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	51.621.920	8.663.336	16.78
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	7	17	242.86	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.741.920	1.140.000	6.43

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	18	18	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33.880.000	7.523.336	22.21
			2	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	%	100	100	100.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	20.910.000	1.705.100	8.15
			2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	630.000	6.30

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya adalah Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan), Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Menyusun jadwal pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah sesuai yang telah dicantumkan dalam PKPT Tahun 2026, Melaksanakan kegiatan pendampingan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pengawasan tahunan dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern perangkat daerah.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Melanjutkan aktivitas yang telah dimulai di Triwulan I atas sosialisasi penilaian mandiri SPIP dan penjaminan kualitasnya serta pembangunan ZI.

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
 Jabatan Pelapor : Pjt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	7	17	242.86	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.741.920	1.140.000	6.43
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	180.000	14.40
			1.2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	0	5	0.00	Reviu Laporan Kinerja	2.440.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	1	50.00	Pengawasan Desa	13.550.920	960.000	7.08
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	0	0	0.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400.000	0	0
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	18	18	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33.880.000	7.523.336	22.21
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	6	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33.880.000	7.523.336	22.21

No	Saaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
3	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	3	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	630.000	6.30
			3.1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	630.000	6.30
			4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	0	100	0.00	Pendampingan dan Asistensi	10.910.000	1.075.100	9.85

No	Sasaran Program/Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			Ko	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			4.1	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	0	30	0.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.525.000	675.000	7.92
			4.2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	30	30	100.00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	985.000	0	0
			4.3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	50	30	100.00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.400.000	400.100	28.58

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Desa

-

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan reviu antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Koordinasi lintas perangkat daerah yang baik dan dukungan pimpinan sehingga kegiatan SPIP (Monitoring RTP Semester II Tahun 2025 dan evaluasi penyusunan perubahan RTP Tahun 2026), RB (Evaluasi RB Tahap Perencanaan) dan Monitoring Pelaporan LHKAN dapat berjalan lancar di Triwulan I Tahun 2026.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Telah dilaksanakan monitoring implementasi RTP Semester II Tahun 2026 serta pendampingan dan evaluasi penyusunan dokumen perubahan RTP Tahun 2026 pada semua perangkat daerah dengan faktor pendukungnya adalah respon aktif dari perangkat daerah atas hasil monitoring, pendampingan dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Komitmen semua tim dalam pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi tahap perencanaan pada perangkat daerah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Komitmen semua tim dan arahan dari pimpinan dalam pelaksanaan monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada perangkat daerah sesuai yang telah dicantumkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Berita Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Belum tercapai sesuai rencana targetnya karena penundaan 1 pengawasan desa di Triwulan I untuk melakukan percepatan evaluasi AKIP

Keljasama Pegawai Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga perwujudannya kerjasama pengawasan internal antar tim dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pendampingan dan Asistensi

Beberapa perangkat daerah belum mengumpulkan dan atau melegalkan dokumen secara tepat waktu sehingga menghambat pelaporan dari APIP.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Belum semua perangkat daerah menyelesaikan penyusunan laporan RTP Semester II tahun 2025 dan perubahan RTP Tahun 2026 secara tepat waktu sehingga harus dibuatkan surat *feedback* hingga tiga kali dan menghambat pelaporannya oleh APIP.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi tahap perencanaan di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Reviu Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV sebagai rekomendasi dalam pertimbangan penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Melanjutkan aktivitas yang telah dimulai di Triwulan I atas sosialisasi penilaian mandiri SPIP dan penjaminan kualitasnya serta pembangunan ZI.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Melanjutkan pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah untuk penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada semua Perangkat Daerah yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II seperti Monitoring RTP Semester I Tahun 2026 dan sosialisasi persiapan penilaian mandiri SPIP dan penjaminan kualitasnya.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Meskipun capaiannya telah 100% karena pengukuran indikator capaiannya adalah jumlah perangkat daerah tapi secara aktivitas pelaksanaannya masih berlanjut per triwulan hingga triwulan IV. Dimana di Triwulan II akan dilaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi tahap pelaksanaan Triwulan I sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Meskipun capaiannya telah 100% karena pengukuran indikator capaiannya adalah jumlah perangkat daerah tapi secara aktivitas pelaksanaannya masih berlanjut. Hal ini dikarenakan dalam sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas tidak hanya memuat monitoring LHKAN saja tapi juga terkait Pembangunan Zona Integritas



Wonogiri, 02 April 2026

Pit. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan
Administrasi Pemerintahan

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
197402061999032008

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: PADMI PUJINASTUTI,S.IP., M.M
: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
: MULYANTO, S.E.
: Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atas	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	0.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	987.000	360.750	36.55
			2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	940.000	0	0
3	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	44	44	100.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.077.241.956	1.522.033.725	22.79
			4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.194.000	0	0
			5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	494.000	0	0

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Ketersediaan data dan arahan pimpinan sehingga capaian melebihi rencana target di Triwulan I karena adanya penugasan tambahan untuk melakukan perubahan atas dokumen perencanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Tahun 2026 sebagai penyesuaian atas perubahan SOTK di Tahun 2026

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pembentukan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), pelaksanaan rapat, ketersediaan data, koordinasi yang baik dan arahan dari pimpinan sehingga capainya 100% di Triwulan I atas penyusunan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah (LKJIP Tahun Anggaran 2026)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Ketersediaan data dan arahan pimpinan sehingga proses penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama Triwulan I Tahun 2026 dapat terlaksana dan berjalan lancar secara tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Ketersediaan data, dokumen, koordinasi dengan bawahan dan arahan dari pimpinan sehingga penyusunan laporan keuangan akhir tahun dapat terlaksana di Triwulan I Tahun 2026

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Ketersediaan data, dokumen, koordinasi dengan bawahan dan arahan dari pimpinan sehingga penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dapat berjalan lancar

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat krusial sehingga proses penyusunan dokumen perencanaan (Dokumen Perubahan RTP Tahun 2026) dapat berjalan lancar

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga proses penyusunan dokumen evaluasi kinerja/LKJIP Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tidak ada faktor penghambat krusial selama penyediaan Gaji

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun sehingga dapat berjalan dengan lancar

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam penyusunan Laporan Keuangan Bulanan sehingga dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2027 di Triwulan II

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Monev dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah/LKIP Tahun Anggaran 2025 telah terselesaikan di Triwulan I Tahun 2026. Namun masih ada aktivitas lanjutannya atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi oleh APDP di Triwulan II

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di triwulan berikutnya karena penyusunan laporan keuangan akhir tahun telah terselesaikan di Triwulan I

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan di Triwulan II

Wongiri, 03 April 2026

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sekretaris


MULYANTO, S.E.
196606181993031010


FADME PUJIASTUTI, S.P., M.M.
197212271992032002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MURNI HASTUTI, S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
: MULYANTO, S.E.
: Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atas-an	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase layanan administrasi BMD	1	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	462.500	0	0
2	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	6	100.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.040.000	0	0
			3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.040.000	0	0
			4	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/tahun	8	8	100.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000	0	0

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.867.200	257.000	8.96
			6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.900.060	0	0
			7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.975.200	0	0
			8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.900	675.000	3.38
			9	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.176.000	900.000	14.57
			10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.033.450	975.000	2.44
			11	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	955.000	0	0
			12	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	846.000	0	0
13	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	300.000	30.00

No	Sasaran Kegiatan Atas	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.300.000	6.610.395	13.98
			15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.372.000	21.614.901	17.96
16	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1	0.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.680.350	2.915.000	14.10
			17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	1	0.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.180.000	7.560.801	9.20
			18	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	1	0.00	Pemeliharaan Mebel	990.000	330.000	33.33
			19	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	100.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	2.400.000	32.00
			20	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit	0	0	0.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.032.000	0	0

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I Tahun 2026 sehingga realisasinya belum ada

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Ketersediaan data dan koordinasi dengan bawahan terkait Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian atas rekap kehadiran pegawai bulanan dan laporan mekanisme kepegawaian bulanan ke BKPSDM

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Ketersediaan data dan dokumen terkait Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai atas SKP Triwulan IV Tahun 2025

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Ketersediaan data rencana pendidikan dan pelatihan di Tahun 2026 sehingga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Triwulan I dapat berjalan lancar sesuai rencana targetnya

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Ketersediaan anggaran dan data kebutuhan atas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ketersediaan anggaran dan data kebutuhan atas Peralatan dan Perlengkapan Kantor di tahun 2026

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Ketersediaan anggaran dan data pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di tahun 2026

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Ketersediaan anggaran dan data kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Ketersediaan anggaran dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Ketersediaan anggaran dalam Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Ketersediaan data arsip aktif dan inaktif

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pembentukan tim pelaksana SPBE dan arahan pimpinan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya seperti laptop dan printer

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pelaksanaannya belum berjalan di Triwulan I Tahun 2026

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain

Pelaksanaan yang rutin sehingga belum ada faktor penghambat yang krusial yang dapat menghambat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain selama ini

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam proses Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di Triwulan I Tahun 2026 atas kinerja pegawai di Triwulan IV Tahun 2025

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pengawasan mandatori di luar perencanaan sehingga terkadang mengakibatkan pegawai terkait yang telah direncanakan pelatibannya menjadi dibatalkan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pelaksanaan sudah rutin

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat berjalan dengan lancar

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dapat berjalan lancar

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada pelaksanaan atas Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di triwulan I Tahun 2026

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tidak ada faktor penghambat yang krusial

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak ada faktor penghambat yang krusial

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Triwulan I Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Triwulan I Tahun 2026

Pemeliharaan Mebel

Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Mebel di Triwulan I

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di triwulan I Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tidak faktor penghambat dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Triwulan I Tahun 2026 karena belum ada realisasi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan ke bawahan terkait penyusunan dokumen atas rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Triwulan I di Triwulan II Tahun 2026

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Melanjutkan pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian atas rekap kehadiran pegawai bulanan dan laporan mekanisme kepegawaian bulanan ke BKPSDM di Triwulan II Tahun 2026

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Melanjutkan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di Triwulan II atas kinerja pegawai Triwulan I Tahun 2026

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sesuai rencana dalam data rencana pendidikan dan pelatihan di Tahun 2026 untuk Triwulan II Tahun 2026

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Triwulan II.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Triwulan II Tahun 2026

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Triwulan II Tahun 2026

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Triwulan II Tahun 2026

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Melanjutkan pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu di Triwulan II Tahun 2026

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Melanjutkan pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Triwulan II Tahun 2026

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Triwulan II Tahun 2026 sesuai yang direncanakan

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD di Triwulan II Tahun 2026

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Triwulan II Tahun 2026

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Triwulan II

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Triwulan II Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Triwulan II Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Triwulan II Tahun 2026

Pemeliharaan Mebel

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Mebel di Triwulan II Tahun 2026

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Triwulan II Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Triwulan II Tahun 2026

Wonogiri, 02 April 2026

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MURNI HASTUTI, S.E., M.M.
197507102009032003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ARIEF WULANDARI, S.P, M.P
Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Muda
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0	0	0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
		Penegakan Integritas								
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

<p>REVIU LPPD</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri. <p>PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Tata cara pemeriksaan telah di lengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai Objek Pemeriksa memberikan respon yang baik atas kegiatan penugasan <p>PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala <p>EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman Penyusunan Renaksi dan evaluasi telah tersedia Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri <p>EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri <p>MONITORING LAPORAN LHKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai Bentuk Laporan sederhana
--

C. FAKTOR PENGHAMBAT

REVIU LPPD

1. Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung
2. Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD
3. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kompetensi belum sesuai standar
2. Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel
2. Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli
3. Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Regulasi atau pedoman belum terbit

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring
2. Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pegawai telat dalam melaporkan LHKAN dan SPT Tahunan

D. RENCANA TINDAK LANJUT**REVIU LPPD**

1. Sosialisasi dan rapat koordinasi diawal waktu

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Peningkatan Kompetensi

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. Dilakukan sosialisasi secara berkala
2. Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara spip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara spip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Secara berkala melakukan sosialisasi



Wonogiri, 02 April 2026

PPUPD Ahli Muda

ARIEF WULANDARI, S.P., M.P.
198203272005012009

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : FREDY GUNTARA, S.H.
Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Basaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0	0	0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
		Penegakan Integritas								
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

REVIU LPPD

1. Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD
2. Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Tata cara pemeriksaan telah di lengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai
2. Objek Pemeriksa memberikan respon yang baik atas kegiatan penugasan

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
2. Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Pedoman Penyusunan Renaksi dan evaluasi telah tersedia
2. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
2. Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan
3. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai
2. Bentuk Laporan sederhana

C. FAKTOR PENGHAMBAT

REVIU LPPD

1. Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung
2. Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD
3. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kompetensi belum sesuai standar
2. Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel
2. Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli
3. Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Regulasi atau pedoman belum terbit

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Regulasi atau pedoman belum terbit

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pegawai telat dalam melaporkan LHKAN dan SPT Tahunan

D. RENCANA TINDAK LANJUT**REVIU LPPD**

1. Sosialisasi dan rapat koordinasi diawal waktu

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Peningkatan Kompetensi

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. Dilakukan sosialisasi secara berkala
2. Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Secara berkala melakukan sosialisasi



Wonogiri, 02 April 2026

PFUPD Ahli Pertama

FREDY GUNTARA, S.H.
199112132025061001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SETYAWAN ARFIANTO, S.Sos
Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Madya
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0	0	0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
		Penegakan Integritas								
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

REVIU LPPD:

1. Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD
2. Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Tata cara pemeriksaan telah di lengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai
2. Objek Pemeriksa memberikan respon yang baik atas kegiatan penugasan

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
2. Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Pedoman Penyusunan Renaksi dan evaluasi telah tersedia
2. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
2. Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan
3. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai
2. Bentuk Laporan sederhana

C. FAKTOR PENGHAMBAT

REVIU LPPD

1. Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung
2. Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD
3. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kompetensi belum sesuai standar
2. Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel
2. Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli
3. Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Regulasi atau pedoman belum terbit

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring
2. Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pegawai telat dalam melaporkan LHKAN dan SPT Tahunan

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Reviu LPPD**

1. Sosialisasi dan rapat koordinasi diawal waktu

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Peningkatan kompetensi

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. Dilakukan sosialisasi secara berkala
2. Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Secara berkala melakukan sosialisasi



Wonogiri, 02 April 2026

REUPD Ahli Madya

SETYAWAN ARFIANTO, S.Sos
197901152005011006

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : FARHAN ADNAN IHFANDI, S.Tr.I.P
Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0	0	0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
		Penegakan Integritas								
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

REVIU LPPD

1. Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD
2. Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Tata cara pemeriksaan telah di lengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai
2. Objek Pemeriksa memberikan respon yang baik atas kegiatan penugasan

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
2. Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Pedoman Penyusunan Renaksi dan evaluasi terlah tersedia
2. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
2. Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan
3. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai
2. Bentuk Laporan sederhana

C. FAKTOR PENGHAMBAT

REVIU LPPD

1. Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung
2. Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD
3. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kompetensi belum sesuai standar
2. Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel
2. Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli
3. Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Regulasi atau pedoman belum terbit

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring
2. Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pegawai telat dalam melaporkan LHKAN dan SPT Tahunan

D. RENCANA TINDAK LANJUT**REVIU LPPD**

1. Sosialisasi dan rapat koordinasi disawal waktu

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Peningkatan Kompetensi

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. Dilakukan sosialisasi secara berkala
2. Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

MONITORING LAPORAN LHKAN

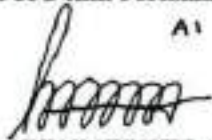
1. Secara berkala melakukan sosialisasi



Wonogiri, 02 April 2026

PPUPD Ahli Pertama

A1


FARHAN ADNAN IHFANDI, S.Tr.I.P
200105012025101001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ANDRIYANTO TULUS WIJAYA, S.Pt
Jabatan Pelapor : PUPD Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0	0	0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencetakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
		Penegakan Integritas								
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

REVIU LPPD

1. Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD
2. Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD
2. Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
2. Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Pedoman Penyusunan Renaksi dan evaluasi telah tersedia
2. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
2. Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan
3. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai
2. Bentuk Laporan sederhana

C. FAKTOR PENGHAMBAT

REVIU LPPD

1. Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung
2. Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD
3. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kompetensi belum sesuai standar
2. Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel
2. Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli
3. Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE)

1. Regulasi atau pedoman belum terbit

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring
2. Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Pegawai telat dalam melaporkan LHKAN dan SPT Tahunan

D. RENCANA TINDAK LANJUT**REVIU LFPD**

1. Sosialisasi dan rapat koordinasi diawal waktu

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Peningkatan Kompetensi

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1. Dilakukan sosialisasi secara berkala
2. Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI TAHAP PERENCANAAN (EX ANTE) dan PELAKSANAAN (ON GOING)

1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi menpan

MONITORING LAPORAN LHKAN

1. Secara berkala melakukan sosialisasi



Wonogiri, 02 April 2026

PPUPD Ahli Pertama

ANDRIYANTO TULUS WIJAYA, S.Pt
198101262010041001

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : RINI SETYA HASTUTI, A.Md
 Jabatan Pelapor : Pranata Komputer Mahir
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Tersusunnya Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Kegiatan UPG	Laporan	1		0.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Aset	Laporan	0	0	0.00	
			3	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	100.00	
			4	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0.00	
5	IKM Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	
6	IKM Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	
7	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional satu Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
				Operasional atau Lapangan						
8	IKM Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi
 Dukungan pimpinan dan tersedianya admin UPG dalam pelaksanaan kegiatan UPG di Inspektorat, serta adanya laporan dari pegawai/ASN/pihak terkait yang menerima atau mengetahui adanya gratifikasi

Laporan Aset
 Belum terdapat faktor pendukung pada Triwulan I karena kegiatan belum direalisasikan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD
 Tersedianya anggaran sehingga pemeliharaan BMD dapat dilaksanakan pada Triwulan I

Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 Belum terdapat faktor pendukung karena kegiatan belum direalisasikan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Belum terdapat faktor pendukung karena kegiatan belum direalisasikan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Belum terdapat faktor pendukung pada Triwulan I karena kegiatan belum direalisasikan

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Ketersediaan anggaran serta data yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin seperti AC, printer, scanner, dan peralatan lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sampai dengan Triwulan I, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target yang direncanakan dapat tercapai

Laporan Aset

Tidak ada faktor penghambat pada Triwulan I karena kegiatan belum direalisasikan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD

Tidak terdapat hambatan yang signifikan sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana

Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Belum terdapat faktor penghambat karena kegiatan belum direalisasikan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Belum terdapat faktor penghambat karena kegiatan belum direalisasikan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belum terdapat faktor penghambat pada Triwulan I karena kegiatan belum direalisasikan

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan pada Triwulan I sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan pada Triwulan I sehingga kegiatan pemeliharaan dapat terlaksana dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan UPG di Triwulan II

Laporan Aset

Melanjutkan pelaksanaannya sesuai rencana pelaksanaan untuk penyusunan laporan aset di Triwulan II

Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD

Melanjutkan pemeliharaan BMD serta melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan tetap sesuai rencana

Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Melakukan persiapan administrasi dan perencanaan pengadaan pada Triwulan II

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala serta memastikan kelengkapan administrasi (pajak dan perizinan) tetap terjaga guna mendukung operasional kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap peralatan dan mesin lainnya guna menjaga kinerja dan memperpanjang umur pakai



INSPEKTUR

MARDIANTO, SE

19710124 199903 1 002

Wonogiri, 02 Maret 2026

Pranata Komputer Mahir

RINI SETYA HASTUTI, A.Md

198110262010012015

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : NINDA SARASWATI, A.Md.Kom
 Jabatan Pelapor : Pranata Komputer Terampil
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -I

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	1	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Tersusunnya Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	0	0	0.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

<p>Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>Tersedianya data pendukung dalam penyusunan laporannya</p> <p>Tersusunnya Laporan Dukungan Pelaksanaan SPBE</p> <p>Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I karena realisasinya masih di triwulan IV</p> <p>Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Dokumen pendukung surat masuk dari bulan Januari - Juni, target laporannya di Triwulan II per satu semester</p>

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan I sehingga dapat tercapai sesuai rencananya

Tersusunnya Laporan Dukungan Pelaksanaan SPBE

Tidak ada faktor penghambatnya karena belum terealisasi

Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tidak ada faktor penghambat karena di realisasikan di Triwulan II

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Melanjutkan penyusunan di Triwulan II sesuai yang telah ditargetkan di Triwulan II

Tersusunnya Laporan Dukungan Pelaksanaan SPBE

Belum ada tindak lanjutnya karena pelaksanaannya masih di Triwulan IV

Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tindak lanjutnya di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Pranata Komputer Terampil

NINDA SARASWATI, A.Md.Kom

199710052025062002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : FITRI LESTARI, S.Kom
 Jabatan Pelapor : Pranata Komputer Mahir
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Tersusunnya Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	6	6	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Tersusunnya Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	1	100.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Tersusunnya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 Tersedianya data pendukung yang memadai dalam penyusunan laporan

Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 Dukungan pimpinan, ketersediaan data kinerja pegawai yang memadai, serta koordinasi yang efektif antar unit kerja

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Tersedianya data rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan pegawai pada Triwulan I

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan dalam penyusunan laporan pada Triwulan I

Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan dalam penyusunan laporan pada Triwulan I

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Mempertahankan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan pada triwulan berikutnya serta meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan data pendukung

Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Meningkatkan kualitas penyusunan laporan melalui penyempurnaan analisis serta menjaga konsistensi dan ketepatan waktu pelaporan pada triwulan berikutnya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Melakukan pemutakhiran data serta peningkatan kualitas penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan pegawai pada triwulan berikutnya



Wonogiri, 02 April 2026

Pranata Komputer Mahir

FITRI LESTARI, S.Kom
198307122010012031

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : JAROD MALADI GUNAWAN, A.Md
 Jabatan Pelapor : Auditor Kepala
 Nama Pimpinan yang Melaksanakan Monev : HADIARTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. Laporan Capaian Kinerja Individu Triwulan Ke -1

No	Nama Kegiatan Utama	Indikator	Kinerja							
			No	Rencana Kinerja	Realisasi Kinerja	Volume	Tarigan Triwulan 1	Realisasi	(%)	Ketersapaian
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0	
2	Terlaksananya Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	3	3	100	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keopkatan Pengawasan Internal yang Terlembak	4	Tersusunnya Laporan Telah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemberkasan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemberkasan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	1	100	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	3	3	100,7	

B. Faktor Pendukung

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Review Laporan Kinerja
 Anahim pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Desa
 Anahim pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Terlelah Intern Antar Tim
 Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga tidak ada realisasi di Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
 Anahim pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atau Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 Capaianya melebihi target yang direncanakan karena adanya penambahan tugas monitoring di luar rencana untuk Review Hasil Pengawasan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP yang ditentukan penggunaannya dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dan Penilaian Indeks Kepuasan Belajar Publik Dalam Negeri Pemerintah Daerah

C. Faktor Penghambat

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Review Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tidak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, sehingga kegiatan tetap dapat terlaksana di Triwulan I Tahun 2026 meskipun ada beberapa tugas mandatori di luar PKPT Tahun 2026

D. Rencana Tidak Lanjut

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan di Triwulan II (bulan Juni Tahun 2026)

Review Laporan Kinerja

Pencapaian penyusunan laporan evaluasi AKIP dan selanjutnya pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terlaksanaan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Pencapaian penyusunan laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah terbantu dan menjadi target

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atau tidak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melaksanakan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Auditor Penjela

JAROD MALADI GURAWAN, A.MM

19760504 201101 1 003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PROWAL
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melapor: Capan Kinerja : PAMELA DEVI CAHYAZNI, S.Ak.

Jabatan Pelapor : Auditor AIG Pertama

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : NARDIANTO, SE

Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. Laporan Capaian Kinerja Individu Triwulan No -1

No	Kategori Kegiatan Utama	Indikator	Kinerja							
			No	Realisasi Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Setoran
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terwujudnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Ditaskan	Laporan	0	0	0	
2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	2	Terwujudnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang ditaskan	Laporan	3	3	100	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terwujudnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Ditaskan	Laporan	1	1	100	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keaktifan Pengawasan Internal yang Terhimpit	4	Terwujudnya Laporan Telah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telah Intern Antar Tim yang Ditaskan	Laporan	0	0	0	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APD	5	Terwujudnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditaskan	Dokumen	1	1	100	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terwujudnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Ditaskan	Laporan	3	5	100,7	

B. Faktor Pendukung

<p>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan 1 sehingga realisasinya juga belum ada seperti dengan Triwulan 1 Tahun 2026</p> <p>Revisi Laporan Kinerja Arahkan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan 1 Tahun 2026</p> <p>Pengawasan Desa Arahkan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan 1 Tahun 2026</p> <p>Terlaba Intern Antar Tim Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan 1 sehingga tidak ada realisasi di Triwulan 1 Tahun 2026</p> <p>Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Arahkan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atau Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026</p> <p>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Capainya melebihi target yang direncanakan karena adanya penambahan tugas mandatori di luar rencana untuk Revisi Besluit Penggunaan SELPA DAU Tahun 2024 yang ditentukan penggunaannya dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dan Perbaikan Indeks Kepuasan Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah</p>
--

C. Faktor Penghambat

<p>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan 1 Tahun 2026</p>

Kerita Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, sehingga kegiatan tetap dapat terlaksana di Triwulan I Tahun 2026 meskipun ada beberapa tugas mandatori di luar PKPT Tahun 2026

D. Rencana Tindak Lanjut

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan di Triwulan II (bulan Juni) Tahun 2026

Kerita Laporan Kinerja

Percepatan penyelesaian laporan evaluasi AKIP dan melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah terserang dan menjadi target

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atau tindak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026
Auditor AHE Pertama

PAMELA DEVI CAHYANI, S.Nk.
140703122026123007

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **E. ENO KRISTYANTO,S.IP**
 Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Madya**
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
 Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. Laporan Capaian Kinerja Individu Triwulan No -1

No	Sumber Kegiatan/Klasifikasi	Indikator	Kinerja							
			No	Sumber Kinerja	Indikator Kinerja	Batas	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terwujudnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Ditaman	Laporan	0	0	0	
2	Terlaksananya Berita Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Berita Laporan Kinerja	2	Terwujudnya Laporan Berita Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi APBD yang ditaman	Laporan	3	3	100	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terwujudnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Ditaman	Laporan	1	1	100	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terwujud	4	Terwujudnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Ditaman	Laporan	0	0	0	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	5	Terwujudnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditaman	Dokumen	1	1	100	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terwujudnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Ditaman	Laporan	3	3	100,7	

B. Faktor Pendukung

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan 1 sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2026

Berita Laporan Kinerja
 Arhan pimpinan dan kasubid tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah ditaman dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan 1 Tahun 2026

Pengawasan Desa
 Arhan pimpinan dan kasubid tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah ditaman dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan 1 Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim
 Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan 1 sehingga tidak ada realisasi di Triwulan 1 Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
 Arhan pimpinan dan kasubid tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah ditaman dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 Capaiannya melebihi target yang direncanakan karena adanya penambahan tugas mandatori di luar rencana untuk Berita Realisasi Pengawasan SIPA DAU Tahun 2024 yang ditaman pengawasannya dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dan Penilaian Indeks Kepuasan Belaya Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah

C. Faktor Penghambat

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan 1 Tahun 2026

Keju Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang kronis karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang kronis sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berlatarbelakangi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang kronis, sehingga kegiatan tetap dapat terlaksana di Triwulan I Tahun 2026 meskipun ada beberapa tugas mendesak di luar PKPT Tahun 2026

D. Rencana Tindak Lanjut

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan di Triwulan II (bulan Juni) Tahun 2026

Keju Laporan Kinerja

Percapaian penyelesaian laporan evaluasi AKIP dan melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Percapaian penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah terencana dan menjadi target

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang terencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya memastikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Auditor Niki Medya

EKO KURNIANTO, SE

19070721 199903 1 002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEKAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja :

: FARIDA ISMI TRI HAPSARI, S.H.

Jabatan Pelapor :

: PPUPD ASB Pertama

Nama Pimpinan yang Melaksanakan Monev :

: MARDIANTO, SE

Jabatan Pimpinan Pelapor :

: INSPEKTUR

A. Laporan Capaian Kinerja Individu Triwulan Ke -1

No	Rencana Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Volume	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Ketercapaian
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terwujudnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Diajukan	Laporan	0	0	0	
2	Terlaksananya Restu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Restu Laporan Kinerja	2	Terwujudnya Laporan Restu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang Diajukan	Laporan	3	3	100	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terwujudnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Diajukan	Laporan	1	1	100	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keaktifan Pengawasan Internal yang Tersebut	4	Terwujudnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Diajukan	Laporan	0	0	0	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	5	Terwujudnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diajukan	Dokumen	1	1	100	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terwujudnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Diajukan	Laporan	3	3	100,0	

B. Faktor Pendukung

<p>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Restu Laporan Kinerja Alasan pimpinan dan kasubiditir tin dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Pengawasan Desa Alasan pimpinan dan kasubiditir tin dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Telaah Intern Antar Tim Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga tidak ada realisasi di Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Alasan pimpinan dan kasubiditir tin dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atau Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026</p> <p>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Capaiannya melebihi target yang dikarenakan karena adanya penambahan tugas tambahan di luar rencana untuk Kerja Realisasi Pengawasan SILPA DAU Tahun 2024 yang diumumkan penggunaannya dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dan Prediksi Indeks Kepuasan Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah</p>
--

C. Faktor Penghambat

<p>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026</p>

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada revisi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, sehingga kegiatan tetap dapat terlaksana di Triwulan I Tahun 2026 meskipun ada beberapa rumpun mandatori di luar PKPT Tahun 2026

D. Rencana Tindak Lanjut

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan di Triwulan II (bulan Juni) Tahun 2026

Revisi Laporan Kinerja

Percepatan penyelesaian laporan evaluasi AKIP dan melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah ditentukan dan menjadi target

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026
RPLUPD ANH Pertama

FARIDA ISMI TRI HAFRIANI, S.H.
19940114 302506 2 002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PRODAWI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Moey
Jabatan Pimpinan Pelapor

: ALFI FAJRIAS MURTI, S.H.
: Auditor Ahli Pertama
: **NARDIANTO, SE**
: INSPEKTUR

A. Laporan Capaian Kinerja Individu Triwulan Ke -1

No	Batasan Kegiatan Utama	Indikator	Kinerja							
			No	Batasan Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	%	Retraspektu
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terlaksananya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0	
2	Terlaksananya Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja	2	Terlaksananya Laporan Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKTP yang disusun	Laporan	3	3	100	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terlaksananya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Tertentukan	4	Terlaksananya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ANP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ANP	5	Terlaksananya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	1	100	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terlaksananya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	3	3	100,00	

B. Faktor Pendukung

<p>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Review Laporan Kinerja Arahian pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Pengawasan Desa Arahian pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Telaah Intern Antar Tim Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga tidak ada realisasi di Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Arahian pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atau Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026</p> <p>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Capaianya melebihi target yang direncanakan karena adanya penugasan tugas tambahan di luar rencana untuk Review Realisasi Penggunaan SELPA DAU Tahun 2024 yang ditentukan penggunaannya oleh Badan Pelaksanaan Umum Tahun Anggaran 2025 dan Prediksi Indeks Kepuasan Belajar Pradik Dalam Negeri Pemerintah Daerah</p>

C. Faktor Penghambat

<p>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026</p>

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan I tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tidak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, sehingga kegiatan tetap dapat terlaksana di Triwulan I Tahun 2026 meskipun ada beberapa tugas mandatori di luar PKPT Tahun 2026

D. Rencana Tidak Lanjut

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan di Triwulan II (bulan Juni) Tahun 2026

Revisi Laporan Kinerja

Percepatan penyelesaian laporan evaluasi AKIP dan melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tidak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonorejo, 02 April 2026
Auditor AKIP Pertama

ALFI FAUZHAN MUNTI, S.Si.
19980926 202506 2 002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DICKY SATRIA, S.E.
Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	5	5	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Revisi Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Revisi Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Desa :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III dan IV

Reviu Laporan Kinerja :

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa :

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring stas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026



Wonogiri, 01 April 2026

Auditor Ahli Pertama

DICKY SATRIA, S.E.
199304142020121002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : NENI SAPTANINGRUM, S.Sos
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Madya
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	5	5	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Reviu Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Desa :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III dan IV

Reviu Laporan Kinerja :

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Persingkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa :

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026



Wonogiri, 01 April 2026

Auditor Ahli Madya

NENI SAPTANINGRUM, S.Sos
197104061996032003

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: FARRIKA KUSFANDARU, S.T.
: Auditor Ahli Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1		0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Revisi Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.



Wonogiri, 06 April 2026

Auditor Ahli Pertama

FARRIKA KUSFANDARU, S.T.
199506082025062002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : AGUS PRIYANTI, A.Md
Jabatan Pelapor : Auditor Penyelia
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	5	5	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Revisi Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Reviu Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Desa :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III dan IV

Reviu Laporan Kinerja :

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa :

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026



Wonorejo, 01 April 2026

Auditor Penyelia

AGUS PRIYANTI, A.Md
198108132011012004

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : WIWIT KARYANTI, S.Akt., M.Acc.
Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -I

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	4	4	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I

Pengawasan Desa

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan I sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Revisi Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan II

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Auditor Ahli Pertama

WIWIT KARYANTI, S.Akt., M.Acc.
198301242006042011

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH, S.Ak
Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	4	4	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Revisi Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I

Pengawasan Desa

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan I sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Revisi Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan II

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Auditor Ahli Pertama

OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH, S.Ak
199810142022032007

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: MUTHIA NOOR SHAFI, S.E.

Jabatan Pelapor

: Auditor Ahli Pertama

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MARDIANTO, SE

Jabatan Pimpinan Pelapor

: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	4	4	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan I Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I

Pengawasan Desa

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan I sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan II

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Auditor Ahli Pertama

MUTHIA NOOR SHAFI, S.E.
199908032025062005

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: Ir.MOH.RIFAI, M.Si.
: Auditor Ahli Utama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -I

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	5	5	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	1	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	12	12	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Kinerja lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.


Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.



Wonorejo, 06 April 2026

Auditor Ahli Utama


Dr. MOH. RIFAL, M.Si.
196405081990031007

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: YULIA INDAH CINTAMI, SE, M.Si
: Auditor Ahli Muda
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	1	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Kinerja lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Revisi Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya,

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.



Wonogiri, 06 April 2026

Auditor Ahli Muda

YULIA INDAH CINTAMI, SE, M.Si
198007312009032007

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: RIZA YOGA SUSANTO, S.E.
: Auditor Ahli Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Saaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	1	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya melebihi rencana aksinya di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2026 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan I Tahun 2026.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.



Wonorejo, 06 April 2026

Auditor Ahli Pertama

RIZA YOGA SUSANTO, S.E.
199703262020121005

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : HERY SUBYANTO, S.IP
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	6	6	100.00	
4	Terlaksananya Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Revisi LKPD yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja, Pemerintah Daerah**

Sebuah Program Kerja, Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah

Asalkan pimpinan dan koordinator tim dapat melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 Triwulan I

Kerja Laporan Kinerja

Asalkan pimpinan dan koordinator tim dapat melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 Triwulan I

Kerita Laporan, Kegiatan

Pelaksanaan target rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 serta rencana pimpinan dan koordinator tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Sebuah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belaka ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Pemantauan Penyicilsaan Kerugian Negara/Daerah

Sebuah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Asalkan pimpinan dan koordinator tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 Triwulan I

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Revisi Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Revisi atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan II

Revisi Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Revisi Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait revisi laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pelaksanaan pembahasan penyelesaian kerugian daerah dengan BPK di Triwulan II atas penanganan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonorejo, 02 April 2026

Auditor Ahli Pertama

HERI SUBYANTO, S.IP
197906302006041008

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : AGUSTIN RATRIANA, SE
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Madya
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	6	6	100.00	
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu LKPD yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kecepatan Kerja Sama Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
7	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	0	1	100.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sebelum Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 Triwulan I

Revisi Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 Triwulan I

Revisi Laporan Keuangan

Pelaksanaan tepat rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kegiatan Pengawasan Internal

Sebelum Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Negara/Desa

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I tapi telah ada realisasinya di Triwulan I karena adanya tugas mendesak di luar perencanaan yang harus dilaksanakan terkait penyelenggaraan kegiatan daerah pada SD N 1 Suroto Jatisarow

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 Triwulan I

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 Triwulan I

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyenggaraan pengawasan keuangan pemerintah daerah di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengurusan surat izin tidak sedang dalam proses dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2024 sehingga pelaksanaan evaluasi AMIP dapat berjalan lancar

Revisi Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Revisi atau LKPD Tahun Anggaran 2024 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF

Selain semua laporan pengawasan yang telah dilakukan monitoring tidak lanjut atau waktuwentasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan oleh LKP diارتباطها

Penanganan Penyelidikan Monevikan Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan tugas mandatori atas penyelesaian kerugian daerah di Triwulan I dapat berjalan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Programman Kinerja Pemerintah Daerah**

Revisi Program Kerja Pengembangan Tahapan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengembangan Tahapan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Penastisipan Tertentu BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan II

Revisi Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengembangan Tahapan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Revisi Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengembangan Tahapan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait revisi laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengembangan Tahapan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AMP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi saat jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Penyelidikan Kerugian Negara/Daerah

Pelaksanaan pembahasan penyelesaian kerugian daerah dengan BPK di Triwulan II atas pengawasan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengembangan Tahapan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengembangan Tahapan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II

 <p>INSPEKTUR JENDERAL MARDIANTO, SE 1985082241990031002</p>	<p>Wonogiri, 02 April 2026</p> <p>Auditor Ahli Madya</p>  <p>AGUSTIN RATRIANA, SE 198508222009032008</p>
---	---

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SUKIYATNO, S.E.
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Setuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	6	6	100.00	
4	Terlaksananya Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Revisi LKPD yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	

B FAKTOR PENDUKUNG**Programan Kinerja Pemerintah Daerah**

Berikut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Araban pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I

Revisi Laporan Kinerja

Araban pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I

Revisi Laporan Keuangan

Pelaksanaan report rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta araban pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Berikut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tingkat Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pemantauan Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah

Berikut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Araban pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengurusan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengurusan Menanganai Panarintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang kronial sehingga pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah di Triwulan I dapat berjalan lancar

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang kronial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan signifikan evaluasi di tahun 2024 sehingga pelaksanaan revisi AKIP dapat berjalan lancar

Revisi Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang kronial sehingga pelaksanaan Revisi atau LUMP Tahun Anggaran 2024 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeliharaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP

Belum semua laporan pengawasan yang sudah dibagikan monitoring tidak budget atau rekapensi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan LUMP yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LUP dibagikan

Pengurusan Penyediaan Kerugian Negara/Daerah



Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang kronial sehingga pelaksanaan penyediaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

<p>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III</p>
<p>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan II</p>
<p>Revisi Laporan Kinerja</p> <p>Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II</p>
<p>Revisi Laporan Keuangan</p> <p>Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait revisi laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I</p>
<p>Kerjasama Pengawasan Internal</p> <p>Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV</p>
<p>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP</p> <p>Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan</p>
<p>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</p> <p>Pelaksanaan pembahasan penyelesaian kerugian daerah dengan BPK di Triwulan II atas penanganan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026</p>
<p>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</p> <p>Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II</p>

 <p>INSPEKTUR MARDIANTO, SE 197101241999031003</p>	<p>Wonogiri, 02 April 2026</p> <p>Auditor Ahli Pertama</p>  <p>SEKIYATNO, S.E. 197408112009011005</p>
---	--

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **AJENG WULAN HAPSARI, S.AR**
 Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
 Nama Pimpinan yang Melakukan Moner : **MARDIANTO, SE**
 Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Materi Kegiatan Alasan	Indikator	Kinerja							
			No	Batasan Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tertunasnya Laporan Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah yang ditunas	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah	2	Tertunasnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah yang ditunas	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	3	Tertunasnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Revisi Laporan Kinerja yang ditunas	Laporan	6	6	100.00	
4	Terlaksananya Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	4	Tertunasnya Laporan Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Revisi LKPP yang ditunas	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Programan Jaringan	Jumlah Keaktifan Pengurusan Internal yang Terbebas	5	Tertunasnya Laporan Talah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Talah Intern Antar Bidang yang ditunas	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	6	Tertunasnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Dokumen	0	0	0.00	
7	Terlaksananya Pengelolaan Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	7	Tertunasnya Laporan Pengelolaan Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Kerugian Negara/ Daerah yang ditunas	Laporan	0	0	0.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tertunasnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditunas	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

<p>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026</p>
<p>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I</p> <p>Revisi Laporan Kinerja</p> <p>Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I</p> <p>Revisi Laporan Keuangan</p> <p>Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya</p>
<p>Kerjasama Pengawasan Internal</p> <p>Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</p> <p>Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026</p>
<p>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</p> <p>Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026</p>
<p>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</p> <p>Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan I</p>

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Revisi Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Revisi atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan II

Revisi Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 agar terselesaikan 100% di Triwulan II

Revisi Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait revisi laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pelaksanaan pembahasan penyelesaian kerugian daerah dengan BPK di Triwulan II atas penanganan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan II



Wonogiri, 02 April 2026

Auditor Ahli Pertama

AJENG WULAN HAPSARI, S.Ak
199912172022032003

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : WIYADI, S.E
Jabatan Pelapor : Pengelola Layanan Operasional
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MURNI HASTUTI, S.E., M.M
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0	0	0.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	1	100.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	1	100.00	
4	IKM Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	100.00	
5	IKM Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	5	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tidak ada faktor pendukung karena belum ada realisasi di triwulan I

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Ketersediaan anggaran dan data dalam mendukung pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan Mebel

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pemeliharaan mebel yang telah terlaksana di triwulan I

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin seperti AC, printer, scanner dan lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin seperti AC, printer, scanner, dan peralatan lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan I

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional di Triwulan I

Pemeliharaan Mebel

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan mebel di Triwulan I

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan mebel di Triwulan I

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan pada Triwulan I sehingga kegiatan pemeliharaan dapat terlaksana dengan baik

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga belum tersedia realisasinya di Triwulan I

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan II sesuai rencana aksinya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional di Triwulan II

Pemeliharaan Mebel

Melanjutkan pelaksanaannya di triwulan II

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin untuk triwulan II

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap peralatan dan mesin lainnya guna menjaga kinerja dan memperpanjang umur pakai

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan II karena pelaksanaannya masih di Triwulan IV sesuai rencana aksi yang telah disusun

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MURNI HASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003

Wonogiri, 02 April 2026

Pengelola Layanan Operasional



WIYADI, S.E
197010132008011004

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SITI DARYANTININGSIH, S.E
 Jabatan Pelapor : Penelaah Teknis Kebijakan
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tersusunnya Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	3	3	100.00	
					Jumlah Laporan Pembayaran TPP	Laporan	3	3	100.00	
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	100.00	
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)	Laporan	3	3	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Telah terealisasi sesuai targetnya di Triwulan I atas penyediaan gaji dan tunjangan ASN di Bulan Januari, Februari dan Maret karena tersedianya sistem pembayaran gaji terintegrasi.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Telah terealisasi sesuai dengan targetnya di Triwulan I atas laporan pembayaran TPP bulan Januari, Februari dan Maret karena Mekanisme pembayaran TPP yang telah baku.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Telah tercapai sesuai dengan targetnya di Triwulan I atas penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025 karena Data keuangan telah tersedia.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Telah tercapai sesuai dengan targetnya di Triwulan I atas laporan fungsional keuangan bulan Januari, Februari dan Maret karena Sistem pelaporan keuangan rutin berjalan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Potensi keterlambatan administrasi karena adanya perubahan data pegawai sehingga perlu dilakukan penyesuaiannya di penyediaan gaji dan tunjangan ASN bulan berikutnya.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Belum ditemukan faktor penghambatnya karena sistem pencatatan kinerja telah tersedia untuk dasar pemberian TPP.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Proses koordinasi lintas bidang yang membutuhkan ketelitian tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Namun hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporan keuangan akhir tahun ke BPKAD.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Keterlambatan input transaksi dapat menghambat proses penyusunan laporan fungsional bulanan namun tidak sampai menjadikan keterlambatan penyusunan laporan fungsional keuangan di Triwulan I.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pembaruan data ASN secara berkala dengan koordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawalan.
- Koordinasi dengan BPKAD dalam hal kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulannya.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Melanjutkan pelaksanaan pembayaran TPP di Triwulan II

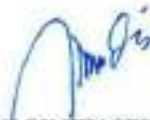
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di triwulan berikutnya karena proses penyusunan telah terselesaikan di Triwulan I

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan di Triwulan II untuk laporan fungsional keuangan bulan April, Mei dan Juni.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
197212271992032002

Wonogiri, 02 April 2026

Penelaah Teknis Kebijakan



SITI DARYANTININGSIH, S.E
196912272007012016

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional Bulanan	Laporan	3	3	100.00	
					Jumlah Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan	Data	3	3	100.00	
					Jumlah Data Rekap Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan	Data	3	3	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renja, PPRG dan RTP)

Terealisasi sesuai targetnya di Triwulan I atas penyusunan dokumen perubahan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026 untuk penyesuaian SOTK dengan faktor pendukungnya adalah :

- Adanya penyesuaian regulasi (Perbup SOTK baru).
- Ketersediaan data risiko dan RTP sebelumnya.

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- Perencanaan jadwal kegiatan telah disusun sesuai tahapan siklus penganggaran.
- Ketersediaan pedoman penyusunan dokumen penganggaran.

Namun belum ditetapkan targetnya di Triwulan I karena penyusunan KAK, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2027 masih di Triwulan III

Jumlah Dokumen PKPT

Faktor pendukungnya adalah kerangka acuan penyusunan PKPT telah tersedia. Namun sampai dengan Triwulan I belum tersedia pedoman MCSP untuk melakukan Perubahan PKPT Tahun 2026 yang telah disusun di Desember 2025.

Jumlah Laporan LKJIP yang Disusun

- Data kinerja telah tersedia dari tahun sebelumnya.
- Dibentuknya Tim penyusun LKJIP.

Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD

- Pedoman penyusunan sudah jelas.
- Data capaian kinerja daerah tersedia.

Jumlah Laporan Penilaian Mandiri SPIP

Belum ada targetnya di Triwulan I karena pelaksanaan masih di Triwulan II dengan faktor pendukungnya adalah Rencana pelaksanaan yang telah disusun (termasuk sosialisasi dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah).

Jumlah Laporan Monitoring RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Target di Triwulan I telah terpenuhi atas penyusunan RB Tahap Perencanaan dengan faktor pendukungnya adalah :

- Komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- Ketersediaan dokumen rencana aksi.

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Target di Triwulan I telah terpenuhi atas pengumpulan laporan kinerja bulan Januari, Februari dan Maret dengan faktor pendukungnya sebagai berikut :

- Sistem pelaporan rutin telah berjalan.
- Ketersediaan data kinerja dan keuangan.

Jumlah Laporan Realisasi RTP

Pelaksanaan masih di Triwulan II sehingga belum ada realisasinya di Triwulan I. Namun telah disiapkan Mekanisme monitoring RTP sejak dari Triwulan I.

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional Bulanan

Terealisasi sesuai targetnya di Triwulan I dengan faktor pendukungnya adalah Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rapat rutin setiap bulannya.

Jumlah Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan

Telah terealisasi sesuai targetnya di Triwulan I atas penyusunan Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan di Bulan Januari, Februari dan Maret karena Sistem pencatatan aktivitas pengawasan telah tersedia.

Jumlah Data Rekap Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan

Dukungan sistem administrasi keuangan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renja, PPRG dan RTP)

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam penyesuaian struktur organisasi dan pemetaan risiko baru dalam Perubahan Dokumen RTP Tahun 2026.

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

Belum memasuki tahapan penyusunan dokumen sehingga belum ada faktor penghambatnya

Jumlah Dokumen PKPT

Belum masuk jadwal penyusunan sehingga belum dapat dijelaskan faktor penghambatnya

Jumlah Laporan LKJIP yang Disusun

Keterlambatan pengumpulan data dari beberapa unit kerja. Namun hal itu tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan dokumen LKJIP ke Bagian Organisasi.

Jumlah Laporan LHPJ dan LPPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pedoman sudah jelas dan telah dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta pendampingan dalam penyusunannya oleh Bagian Pemerintahan dan Inspektorat.

Jumlah Laporan Penilaian Mandiri SPIP

Belum ada realisasinya di Triwulan I karena pelaksanaan sosialisasi dan input aplikasi masih di Triwulan II.

Jumlah Laporan Monitoring RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Penyesuaian rencana aksi RB baru di Tahun 2026 sehingga diperlukan waktu untuk dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan bidang terkait (lintas bidang).

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Keterlambatan input data oleh unit kerja. Namun di Triwulan I ini, hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporannya.

Jumlah Laporan Realisasi RTP

Belum periode pelaporan karena pelaporannya per semester sehingga belum dapat dijelaskan faktor penghambatnya.

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional Bulanan

Penyesuaian jadwal kegiatan pegawai. Namun hal ini tidak sampai menjadikan rapat operasional bulanan menjadi dibatalkan atau tidak terlaksana.

Jumlah Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan

Ketepatan waktu input data karena keterbatasan SDM dengan 1 pelaksana saja.

Jumlah Data Rekap Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan

Keterlambatan pelaporan realisasi oleh pelaksana kegiatan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renja, PPRG dan RTP)

Tindak lanjutnya di atas penyusunan dokumen perubahan RTP Tahun 2026 adalah :

- Monitoring RTP dengan SOTK terbaru setiap triwulan.
- Penguatan koordinasi lintas bidang untuk memastikan implementasi RTP terealisasi sesuai RTP nya.

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- Mempersiapkan data dukung dan bahan awal penyusunan.
- Koordinasi awal dengan BPKAD/Bappeda terkait jadwal dan kebijakan penganggaran.

Jumlah Dokumen PKPT

- Menyiapkan data prioritas pengawasan berbasis risiko.
- Koordinasi awal dengan semua bidang.

Jumlah Laporan LKjIP yang Disusun

Tindak lanjutnya adalah melakukan evaluasi kinerja yang telah dituangkan dalam LKjIP untuk dilakukan perbaikan serta menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi AKIP dari auditor.

Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya karena data dan dokumen yang dikumpulkan sudah dinilai sesuai oleh reviewer.

Jumlah Laporan Penilaian Mandiri SPIP

- Pelaksanaan sosialisasi (rencana menghadirkan narasumber BPKP).
- Persiapan penilaian mandiri SPIP.

Jumlah Laporan Monitoring RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Tindak lanjutnya di triwulan berikutnya adalah melakukan monitoring implementasi RB atas rencana aksi yang telah disusun di Triwulan I

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Tindak lanjutnya di triwulan berikutnya adalah :

- Penegasan batas waktu pelaporan ke semua sub bagian dan bidang.
- Monitoring berkala atas kepatuhan pelaporan.

Jumlah Laporan Realisasi RTP

Tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah :

- Monitoring pelaksanaan RTP secara internal seperti yang telah dilaksanakan di Triwulan I.
- Persiapan data dan dokumen pendukung untuk laporan semester I.

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional Bulanan

Tindak lanjutnya adalah melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan II untuk kelancaran operasional setiap bulannya.

Jumlah Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan

Tindak lanjutnya adalah :

- Peningkatan disiplin pencatatan.
- Validasi data secara berkala oleh auditor dan PPUPD sebagai pelaksana aktivitas pengawasan.

Jumlah Data Rekap Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan


- Penguatan koordinasi dengan bendahara.
- Monitoring realisasi anggaran secara rutin.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan


PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
197212271992032002

Wonogiri, 02 April 2026

Penelaah Teknis Kebijakan


ENI SUSANTI, S.E
198911162020122001

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : BAYU SIDIK PURNOMO, S.E
Jabatan Pelapor : Penelaah Teknis Kebijakan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Basaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)	Dokumen	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan	Laporan	1	1	100.00	
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	100.00	
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- Perencanaan jadwal kegiatan telah disusun sesuai tahapan siklus penganggaran.
- Ketersediaan pedoman penyusunan dokumen penganggaran.

Namun belum ditetapkan targetnya di Triwulan I karena penyusunan KAK, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2027 masih di Triwulan III

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Target di Triwulan I telah terpenuhi atas pengumpulan laporan realisasi keuangan di bulan Maret dengan faktor pendukungnya sebagai berikut :

- Sistem pelaporan rutin telah berjalan.
- Ketersediaan data keuangan.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Telah tercapai sesuai dengan targetnya di Triwulan I atas penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025 karena Data keuangan telah tersedia.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Telah tercapai sesuai dengan targetnya di Triwulan I atas laporan fungsional keuangan bulan Maret karena Sistem pelaporan keuangan rutin berjalan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

Belum memasuki tahapan penyusunan dokumen sehingga belum ada faktor pengambatnya

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Keterlambatan input data oleh unit kerja. Namun di Triwulan I ini, hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporannya.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Proses koordinasi lintas bidang yang membutuhkan ketelitian tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Namun hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporan keuangan akhir tahun ke BPKAD.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Keterlambatan input transaksi dapat menghambat proses penyusunan laporan fungsional bulanan namun tidak sampai menjadikan keterlambatan penyusunan laporan fungsional keuangan di Triwulan I.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- Mempersiapkan data dukung dan bahan awal penyusunan.
- Koordinasi awal dengan BPKAD/Bappeda terkait jadwal dan kebijakan penganggaran.

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Tindak lanjutnya di triwulan berikutnya adalah :

- Penegasan batas waktu pelaporan ke semua sub bagian dan bidang.
- Monitoring berkala atas kepatuhan pelaporan.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di triwulan berikutnya karena proses penyusunan telah terselesaikan di Triwulan I

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan di Triwulan II untuk laporan fungsional keuangan bulan April, Mei dan Juni.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan


PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
197212271992032002

Wonogiri, 02 April 2026

Penelaah Teknis Kebijakan


BAYU SIDIK PURNOMO, S.E
199403272020121003

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : MARDIONO, S.E
 Jabatan Pelapor : Pengolah Data dan Informasi
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)	Laporan	12	12	100.00	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Revisi)	Laporan	18	18	100.00	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)	Laporan	19	19	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya di Triwulan I dengan beberapa faktor pendukungnya yaitu :

- Telah tersusunnya LHP Audit dan Pemeriksaan oleh Bidang sebagai bahan utama untuk didokumentasikan.
- Tersedianya sistem atau mekanisme administrasi pencatatan dan penyimpanan dokumen (baik manual maupun digital).
- Adanya petugas/pegawai yang menangani fungsi administrasi dan kearsipan.
- Format dan tata naskah dinas yang telah baku sehingga memudahkan proses pencatatan dan pengarsipan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya di Triwulan I dengan faktor pendukungnya sebagai berikut :

- LHP Reviu telah disusun oleh Bidang sebagai dasar kegiatan dokumentasi.
- Adanya alur administrasi yang mengatur penyerahan dokumen dari Bidang ke bagian pengelola.
- Ketersediaan sarana penyimpanan dokumen (lemari arsip maupun media digital).
- Adanya kebiasaan pencatatan dokumen masuk/keluar dalam register atau aplikasi.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya di Triwulan I dengan beberapa faktor pendukungnya sebagai berikut :

- Tersedianya berbagai jenis LHP pengawasan lainnya (monitoring, evaluasi, dll) dari Bidang.
- Fleksibilitas dalam bentuk dan jenis dokumen sehingga memudahkan pengumpulan.
- Adanya dukungan administrasi umum dalam pengelolaan dokumen.
- Ketersediaan tempat dan media penyimpanan arsip.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

Meski telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun terkadang masih terjadi kendala/hambatan seperti :

- Keterlambatan penyerahan LHP dari Bidang kepada pengelola administrasi.
- Penumpukan dokumen pada waktu tertentu sehingga proses pencatatan dan penyimpanan tidak langsung dilakukan.
- Belum optimalnya sistem pengarsipan digital (misalnya penamaan file, folder, atau indexing belum seragam).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi seperti :

- Dokumen hasil reviu sering mengalami perbaikan sehingga memperlambat proses dokumentasi final.
- Kurangnya ketepatan waktu dalam penyampalan dokumen dari Bidang.
- Belum tertibnya pencatatan dalam register atau sistem administrasi.
- Risiko duplikasi atau kehilangan dokumen apabila tidak segera didokumentasikan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi sebagai berikut :

- Variasi bentuk dokumen menyebabkan belum seragamnya pola pencatatan dan penyimpanan.
- Tidak semua hasil pengawasan lainnya langsung diserahkan untuk didokumentasikan.
- Potensi keterlambatan dokumentasi karena volume dokumen yang cukup banyak.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

- Meningkatkan koordinasi dengan Bidang agar LHP yang telah selesai segera diserahkan untuk didokumentasikan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

- Menegaskan mekanisme bahwa hanya dokumen final yang didokumentasikan.
- Meningkatkan kedisiplinan pencatatan dalam buku register atau aplikasi.
- Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum disimpan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

- Mendorong ketepatan waktu penyampaian dokumen dari Bidang.
- Melakukan monitoring rutin terhadap kelengkapan dokumentasi.

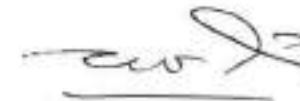
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
197212271992032002

Wonogiri, 02 April 2026

Pengolah Data dan Informasi



MARDIONO, S.E
197012152014061002

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pemeliharaan Mebel

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan mebel di Triwulan I

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga belum tersedia realisasinya di Triwulan I

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pemeliharaan Mebel

Melanjutkan pelaksanaannya di triwulan II

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan II karena pelaksanaannya masih di Triwulan IV sesuai rencana aksi yang telah disusun

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MURNI HASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003

Wonogiri, 06 April 2026

Pengelola Umum Operasional



SARWANTO
197208172025211025

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : LASTO PAMUNGKAS
 Jabatan Pelapor : Pengelola Umum Operasional
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MURNI HASTUTI, S.E., M.M
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Melayani antar jemput pegawai dan melayani transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas	Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas	Laporan	3	3	100.00	
			2	Memeriksa dan menyiapkan perangkat kendaraan dinas agar selalu siap pakai	Kendaraan dinas yang selalu siap pakai	Laporan	3	3	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan beberapa faktor pendukungnya :

- Ketersediaan kendaraan dinas dalam kondisi operasional yang baik.
- Jadwal kegiatan kedinasan relatif terencana sehingga penggunaan kendaraan dapat diatur.
- Dukungan pengemudi (driver) yang disiplin dan memahami rute serta kebutuhan pelayanan.
- Ketersediaan anggaran operasional (BBM dan pemeliharaan ringan) yang mencukupi.
- Koordinasi internal yang berjalan baik antar bagian pengguna kendaraan.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan faktor pendukungnya :

- Pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan (servis berkala).
- Kedisiplinan pengemudi dalam merawat kendaraan setelah digunakan.
- Ketersediaan anggaran pemeliharaan kendaraan.
- Kebiasaan pemeriksaan kendaraan secara berkala.
- Dukungan administrasi dalam pencatatan kondisi kendaraan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan beberapa faktor penghambatnya :

- Potensi benturan jadwal penggunaan kendaraan jika kegiatan meningkat.
- Keterbatasan jumlah kendaraan dibanding kebutuhan pada waktu tertentu.
- Risiko gangguan teknis kendaraan secara tiba-tiba.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan faktor penghambatnya :

- Usia kendaraan yang sudah tua berpotensi mengalami kerusakan.
- Keterbatasan waktu untuk perawatan jika kendaraan sering digunakan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan tindak lanjutnya :

- Menyusun dan memperketat sistem penjadwalan kendaraan dinas.
- Melakukan pengecekan rutin kendaraan sebelum digunakan (pre-check).
- Menyusun skala prioritas penggunaan kendaraan untuk kegiatan kedinasan.
- Mengoptimalkan koordinasi antar pengguna kendaraan melalui administrasi peminjaman.
- Mengantisipasi kebutuhan tambahan kendaraan (jika diperlukan) melalui perencanaan ke depan.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan tindak lanjutnya :

- Menjadwalkan servis berkala secara konsisten sesuai standar.
- Melakukan pemeriksaan harian/mingguan terhadap kondisi kendaraan.
- Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penggantian kendaraan.
- Meningkatkan kedisiplinan penggunaan kendaraan sesuai prosedur.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MURNI HASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003

Wonogiri, 06 April 2026

Pengelola Umum Operasional



LASTO PAMUNGKAS
197512162025211016

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

Meski telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun terkadang masih terjadi kendala/hambatan seperti :

- Keterlambatan penyerahan LHP dari Bidang kepada pengelola administrasi.
- Penumpukan dokumen pada waktu tertentu sehingga proses pencatatan dan penyimpanan tidak langsung dilakukan.
- Belum optimalnya sistem pengarsipan digital (misalnya penamaan file, folder, atau indexing belum seragam).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Revisi)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi seperti :

- Dokumen hasil revisi sering mengalami perbaikan sehingga memperlambat proses dokumentasi final.
- Kurangnya ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen dari Bidang.
- Belum tertibnya pencatatan dalam register atau sistem administrasi.
- Risiko duplikasi atau kehilangan dokumen apabila tidak segera didokumentasikan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi sebagai berikut :

- Variasi bentuk dokumen menyebabkan belum seragamnya pola pencatatan dan penyimpanan.
- Tidak semua hasil pengawasan lainnya langsung diserahkan untuk didokumentasikan.
- Potensi keterlambatan dokumentasi karena volume dokumen yang cukup banyak.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

- Meningkatkan koordinasi dengan Bidang agar LHP yang telah selesai segera diserahkan untuk didokumentasikan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Revisi)

- Menegaskan mekanisme bahwa hanya dokumen final yang didokumentasikan.
- Meningkatkan kedisiplinan pencatatan dalam buku register atau aplikasi.
- Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum disimpan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

- Mendorong ketepatan waktu penyampaian dokumen dari Bidang.
- Melakukan monitoring rutin terhadap kelengkapan dokumentasi.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
197212271992032002

Wonogiri, 02 April 2026

Pengolah Data dan Informasi



MARDIONO, S.E
197012152014061002